



Pendataan PKL Malioboro Cegah Jual Beli Lapak

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengulirkan pendataan ulang untuk para pedagang di Teras Malloboro 2. Langkah ini ditempuh sebagai persiapan jelang perjanjian kerjasama yang bersifat kontraktual, sekaligusantisipasi fenomena tukar guling lapak.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Yogyakarta, Yetty Martanti, mengatakan, proses verifikasi tersebut, dilakukan pada September 2022. Menerutnya, melalui perjanjian ini, Pemkot hendak menyatukan persepsi dengan para pedagang yang beraktivitas di Teras Malloboro 2.

"Jadi, perjanjian itu dalam rangka memahami apa yang menjadi aturan-aturan pokok, tugas, kewajiban dan hak, serta sanksi bagi pedagang," katanya, Jumat (2/9).

Selain itu, lanjut Yetty, tujuan dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat secara hukum dalam pemanfaatan lapak di Teras Malloboro 2. Maka, segala jenis pelanggaran, termasuk tukar guling lapak, akan ada konsekuensi sanksi.

"Pendataannya dilakukan UPT Penge-

lolaan Kawasan Cagar Budaya. Nanti, kami melibatkan paguyuban pedagang juga, seperti Tridharma, maupun lesehan," ujarnya.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Ekwanto mengungkapkan, melalui pendataan ulang tersebut, pihaknya ingin memastikan, lapak-lapak di Teras Malloboro 2 saat ini benar-benar ditempati oleh pedagang sesuai dengan data awal saat relokasi lalu.

"Totalnya kan ada 1.041 pedagang. Jadi, ini diverifikasi lagi, untuk didata ulang, apakah ada perubahan pemanfaatan lapak di sana, sebelum tekan kontrak," ujarnya.

Kemudian, setelah rampung didata, para pedagang akan menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah. Dalam perjanjian tersebut, hanya pedagang yang namanya terverifikasi sesuai data awal, yang boleh menekan kontrak. Sehingga, potensi tukar guling lapak bisa dicegah.

"Masing-masing individu, *one by one*, tidak bisa diwakili, kami pastikan dia benar-benar pedagang di sana, sesuai dengan hasil undian kemarin. Nanti, terkait sewa dan sebagainya, jadi kebi-

jakan Pemda DIY. Batas kontrak dua tahun dan bisa diperpanjang. Tapi, lapak tidak boleh diperjualbelikan, itu kan punya negara, punya pemerintah, pindah tangan pun tidak bisa," lanjutnya.

Tidak memungkiri

Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tridharma, Rudiarto, mengatakan, bahwa terkait jumlah dan nama-nama pedagang yang beraktivitas di Teras Malloboro 2 sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja, ia tidak memungkiri, ada beberapa pedagang yang saling tukar lapak.

"Itu terjadi karena misal, ada lapak milik pedagang yang punya hubungan kerabat, ingin berdekatan, sehingga ditukar sama teman yang lain, supaya nunggu dagangannya bisa gantian, kan repot kalau berjauhan. Jadi, itu sudah hasil musyawarah antar pedagang," cetusnya.

Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah ternyata mempunyai pandangan lain, dimana kontraktual yang sedang dijajaki ini, harus sesuai dengan data awal. Walau

begitu, pihaknya pun menyerahkan se-

menanya kembali lokasi lapak para penjual. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005